

## FENOMENA MONEY POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DESA KAUMAN SUKOHARJO TERHADAP NILAI DEMOKRASI PANCASILA

Ismi Nur Azizah<sup>1</sup>, Firzanah Khairunnajwa<sup>2</sup>, Azkiya Nauli Fitriya<sup>3</sup>, Syifa Syauqiyyah Halda<sup>4</sup>, Sholahudin Rozzaq<sup>5</sup>, Achmad Zam Zidanfil<sup>6</sup>, Naim Rohmansyah<sup>7</sup>, Suryo Ediyono<sup>8</sup>

[azizaaaaahismi@student.uns.ac.id](mailto:azizaaaaahismi@student.uns.ac.id)<sup>1</sup>, [firzanahkhairunnajwa@student.uns.ac.id](mailto:firzanahkhairunnajwa@student.uns.ac.id)<sup>2</sup>,  
[azkiyanaulifitri.04@student.uns.ac.id](mailto:azkiyanaulifitri.04@student.uns.ac.id)<sup>3</sup>, [syifasyauqiyyahhalda@student.uns.ac.id](mailto:syifasyauqiyyahhalda@student.uns.ac.id)<sup>4</sup>,  
[sholahudinrozzaq7@student.uns.ac.id](mailto:sholahudinrozzaq7@student.uns.ac.id)<sup>5</sup>, [achmadzamzidanfil@student.uns.ac.id](mailto:achmadzamzidanfil@student.uns.ac.id)<sup>6</sup>,  
[naim\\_rohmansyah1@student.uns.ac.id](mailto:naim_rohmansyah1@student.uns.ac.id)<sup>7</sup>, [ediyonosuryo@staff.uns.ac.id](mailto:ediyonosuryo@staff.uns.ac.id)<sup>8</sup>

Universitas Sebelas Maret Surakarta

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena politik uang (money politics) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Desa Kauman dan implikasinya terhadap nilai-nilai demokrasi Pancasila. Politik uang, sebagai bentuk pelanggaran etika dan hukum, sering kali menjadi tantangan dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang di Desa Kauman terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang tunai, bantuan barang, dan janji-janji politik. Fenomena ini mengindikasikan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial dan kedaulatan rakyat. Studi ini juga mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, termasuk rendahnya literasi politik, kondisi ekonomi masyarakat, dan lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini menyarankan penguatan edukasi politik berbasis nilai-nilai Pancasila serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum sebagai upaya untuk meminimalkan politik uang dalam pemilu mendatang

**Kata Kunci:** Politik Uang, Nilai Demokrasi, Integritas Pemilu.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the phenomenon of money politics in the 2024 General Election in Kauman Village and its implications for the values of Pancasila democracy. Money politics, as an ethical and legal violation, often challenges the realization of fair and honest elections. This research employs a qualitative approach with a case study method, collecting data through in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that money politics practices in Kauman Village occur in various forms, such as cash distribution, material aid, and political promises. This phenomenon indicates a weak understanding of Pancasila values, particularly social justice and people's sovereignty. The study also identifies contributing factors, including low political literacy, economic conditions, and weak law enforcement. This research recommends strengthening political education based on Pancasila values and enhancing supervision and law enforcement to minimize money politics in future elections.*

**Keywords:** Money Politics, Democratic Values, Electoral Integrity.

### PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yang bertujuan untuk menjamin hak-hak politik setiap warga negara dalam memilih dan dipilih sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam konteks demokrasi Pancasila, Pemilu tidak hanya menjadi mekanisme pergantian kekuasaan secara damai, tetapi juga sarana untuk mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti keadilan

sosial, musyawarah untuk mufakat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Bangsa Indonesia ingin mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang merupakan ciri khas dari masyarakat demokratis. Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang mengakui hak-hak asasi manusia. Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang terbuka dimana setiap anggotanya merupakan pribadi yang bebas dan mempunyai tanggung jawab untuk membangun masyarakatnya sendiri dengan mengakui perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakatnya.

Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari kata Yunani, “demos” berarti rakyat dan “kratos/kratein” berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti “rakyat berkuasa” (government of rulle by the people). Ada pula definisi singkat untuk istilah demokrasi yang diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun demikian penerapan demokrasi diberbagai negara di dunia, memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing, yang lazimnya sangat oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam suatu negara (Kaelan, 2016: 63).

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Pemilu sering kali diwarnai oleh berbagai permasalahan, salah satunya adalah fenomena money politik. Firmanzah (2008) Partisipasi adalah keikutsertaan secara aktif dalam suatu partai politik tertentu ataupun dengan memberikan suara selama Pemilu. Partisipasi secara harfiah merupakan keikutsertaan, dalam konteks politik, hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik itu merupakan salah satu aspek terpenting dalam sebuah tatanan negara demokrasi dalam memilih dan menentukan pemimpin dan wakil rakyat di parlemen.

Alexander (2006) Politik transaksional dapat dikategorikan ke dalam money politic.

Uang mempunyai “keuntungan” dibandingkan dengan sumber daya lainnya seperti jasa maupun bentuk natural lainnya. Uang sangat mudah untuk ditransfer dan dapat digunakan untuk aktivitas apa saja tanpa perlu diketahui sumbernya. Oleh karena itu Segala bentuk money politic harus dihilangkan dalam berbagai bentuk pemilihan umum dan perlu adanya pendidikan politik bagi para pemilih pemula untuk membangun kesadaran lebih luas mengenai peran penting mereka dalam mereduksi praktek-praktek politik uang.

Desa Kauman, sebagai bagian dari masyarakat pedesaan yang menjadi basis pemilih, tidak luput dari dinamika tersebut. Fenomena money politik yang terjadi di Desa Kauman pada Pemilu 2024 menjadi gambaran nyata dari tantangan yang dihadapi dalam menjaga kemurnian demokrasi di tingkat lokal. Praktik politik uang dapat merusak moralitas masyarakat, mengurangi partisipasi politik yang berbasis kesadaran, dan melanggengkan budaya pragmatisme politik yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena money politik pada Pemilu 2024 di Desa Kauman dan dampaknya terhadap penerapan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pencegahan praktik politik uang serta memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam setiap proses politik.

## **METODOLOGI**

Metode ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini tidak menggunakan angka, dimana nantinya akan berbentuk deskriptif (Sugiyono, 2017). Penelitian menggunakan kualitatif dikarenakan dapat mendeskripsikan fakta nyata yang berada di lapangan dan dapat menjelaskan lebih dalam (Anggito, 2018). Metode ini akan sangat membantu dalam menggali data di lapangan karena ingin mendapatkan data sesungguhnya dari berbagai pengalaman subjek penelitian.

### **Teknik pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling.**

Teknik pengumpulan data ini mengambil data sesuai dengan tujuan penelitian sehingga data yang dituju benar-benar sesuai serta berdasarkan pengalaman dari subjek penelitian (Etikan, 2016). Jika sesuai dengan pengalaman maka data akan lebih akurat dan berkaitan dengan fokus penelitian.

Subjek penelitian ialah warga Desa Kauman yang memilih kepala desa karena uang yang mereka terima. Pengumpulan akan menggunakan teknik wawancara agar mendapatkan informasi secara mendalam dari subjek penelitian. Subjek penelitian dipilih karena penelitian akan mendapat data yang akurat. Subjek penelitian dipilih karena dirasa akan membantu mendapatkan data yang beragam atas pengalaman yang mereka alami. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan informasi yang bisa didapatkan dari media.

Penelitian ini dikaji menggunakan kacamata fenomenologi milik Alfred Schutz. Menurut Schutz tindakan seseorang dipengaruhi karena situasi biografinya, sehingga makna tidak bisa terlepas dari hal tersebut. Makna yang ada menjadi relevansi atas proses interaksi sosial, sehingga tujuan individu tersebut dapat terlihat. Penggunaan fenomenologi pada penelitian ini diharapkan dapat mengklasifikasi, mengidentifikasi, serta membandingkan model tindakan sosial lebih luas namun tetap sebagai suatu fenomena dalam terbentuknya suatu tindakan (Nindito, 2013). Dari pemikiran Schutz bisa kita lihat bahwa adanya makna didalam masyarakat dapat terbentuk jika terjadi hubungan sosial dalam masyarakat itu sendiri. Fenomenologi juga melihat masyarakat berdasarkan pengalaman yang terjadi di masyarakat (Adian, 2016).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pandangan Masyarakat Terhadap Politik Uang**

Penelitian ini mengambil garis besar setelah melakukan wawancara kepada subjek, bahwa mereka menganggap politik uang ialah sebagai suatu hal yang biasa. Politik uang sendiri dianggap sebagai tradisi. Seperti perkataan dari salah satu sumber subjek informan yang mengatakan bahwa hal itu (memberi sejumlah uang pada masyarakat) adalah hal sudah biasa terjadi. Bahkan masyarakat melihat “keseruan” dari permainan politik uang ini. Mereka dapat melihat siapakah yang akan menang, calon yang mengeluarkan uang banyak sampai calon yang tidak mengeluarkan uang. Uang yang diberikan, bertujuan untuk mengambil kesempatan dari masyarakat agar mereka memilih calon presiden.

Menerima politik uang tidak berdampak buruk bagi mereka sehingga membuat masyarakat tidak menolak hal tersebut. Adanya politik uang juga akan menguntungkan mereka secara ekonomi. Anggapan bahwa para calon semua saja, hanya menginginkan kedudukan di mata masyarakat membuat mereka lebih baik mengambil uang tersebut. Karena pada akhirnya semua calon mengeluarkan uang untuk berlomba-lomba “membeli” suara.

Pemberian uang yang tidak memandang umur (sesuai kriteria) membuat target juga bermacam-macam. Jika ditinjau dari lapangan bahwa lebih banyak warga yang berumur datang untuk memilih, serta uang ditunjukkan kepada mereka juga lebih mudah. Hal ini dikarenakan mereka tidak mengetahui bahwa politik uang atau pemberian uang untuk membeli suara mereka, sebenarnya salah satu dari korupsi. Mereka yang terbiasa dengan “tradisi” ini menganggap hal ini wajar dilakukan.

### **Penerimaan Uang Untuk Meningkatkan Partisipasi**

Pemilihan umum adalah saat penting bagi suatu negara untuk menentukan arah

politiknya. Namun, banyak kasus politik uang yang terjadi, yang mengurangi kepercayaan pada pemilu. Selain itu, pemilih yang rendah juga membuat hasil pemilu tidak mencerminkan keinginan masyarakat.

Baru-baru ini, seorang anggota salah satu Partai diduga membagikan uang kepada pemilih di daerah pemilihan. Menurut informasi Bawaslu, amplop yang disebarkan berisi uang Rp70.000/kepala keluarga. Meskipun tidak melanggar hukum pemilu, pembagian uang ini menimbulkan potensi masalah hukum karena dapat mempengaruhi pemilih. Partai politik seharusnya menjadi contoh dalam mendorong partisipasi pemilih dan menghindari politik uang.

Ditambah lagi dengan mayoritas masyarakat yang berada pada ekonomi menengah kebawah menjadikan masyarakat menganggap politik uang bukan hanya sebagai “tradisi” akan tetapi sebagai hal yang harus dilakukan oleh kandidat pemilu, dikarenakan pandangan masyarakat yang menganggap calon yang tidak menggunakan politik uang sama saja tidak berniat untuk mencalonkan diri.

Sehingga mayoritas masyarakat menilai bahwa pemilu bukan hanya sebagai pesta demokrasi tetapi juga sebagai ajang pesta rakyat dimana hanya diadakan setiap lima tahun sekali dan itu dijadikan oleh sebagian masyarakat sebagai ajang untuk mencari uang secara instan dari para caleg

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, pemerintah perlu mendorong kesadaran politik sejak dini melalui pendidikan politik di keluarga dan sekolah. Selain itu, pemilihan umum harus dibuat lebih mudah diakses, termasuk dalam hal pendaftaran pemilih dan menjamin hak suara tanpa intimidasi.

Selain meningkatkan partisipasi, penting juga untuk mencegah politik uang. Politik uang dapat merusak sistem demokrasi dan keadilan pemilu. Oleh karena itu, partai politik harus memastikan bahwa kandidat mereka tidak melakukan praktik politik uang. Kasus PDIP ini menunjukkan bahwa partai harus lebih baik dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi.

Masyarakat perlu berpikir aktif melakukan praktik melawan politik uang dan memperjuangkan pemilu yang bersih. Kita harus memilih berdasarkan visi dan misi, bukan karena uang. PDIP dan partai lainnya harus bertanggung jawab terhadap masalah ini dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi yang jujur.

Pemerintah juga harus mempermudah pendaftaran pemilih dan memperkuat demokrasi. PDIP harus mengambil tindakan terhadap anggotanya yang terlibat politik uang dan menunjukkan komitmen pada nilai-nilai demokrasi. Meningkatkan partisipasi pemilih dan mencegah politik uang sangat krusial untuk menjaga integritas demokrasi di Indonesia.

#### **Pemahaman Nilai Demokrasi pada Masyarakat Desa Kauman.**

Pada dasarnya pemilu merupakan suatu keniscayaan politik untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Bahkan bagi kebanyakan negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri. Hal ini disadari karena pemilu merupakan wujud nyata dari implementasi demokrasi. Dengan kata lain, pemilu merupakan konsekuensi logis dari sistem demokrasi.

Akan tetapi banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwasannya meskipun pemilu merupakan wujud nyata implementasi demokrasi, tidak selamanya pemilihan bersifat demokratis. Oleh karenanya, pemilu sebagai salah satu aspek demokrasi juga harus diselenggarakan secara demokratis.

Standar minimal demokrasi biasanya adalah adanya pemilu reguler yang bebas untuk menjamin terjadinya rotasi pemegang kendali negara tanpa adanya penyingkiran terhadap suatu kelompok politik manapun, adanya partisipasi aktif dari warga negara dalam pemilu

itu dan dalam proses penentuan kebijakan, terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan bagi para warga negara untuk mengorganisasi diri dalam organisasi sipil yang bebas atau dalam partai politik.

Senada dengan itu Martin Suryajaya mengatakan bahwa Konsep dasar dari demokrasi adalah sebuah rights-based politics, sebuah politik yang bertumpu pada hak. Ini dibuktikan dimana dasar dari konstitusi setiap negara demokratis terdapat pengakuan pada Hak Asasi Manusia sebagai hak konstitusional atau sebagai hak warga negara.

Hak memerintah diri ini lahir dikarenakan suatu asumsi bahwa masing-masing orang sebagai individu lebih mengetahui dirinya sendiri atau lebih mengetahui kepentingan dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Hak inilah kemudian yang kita mandatkan melalui pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah kepada pemimpin atau perwakilan kita sebagai sesuatu bentuk representasi hak rakyat secara kolektif yang kemudian lebih jauh diartikan sebagai pemerintahan rakyat.

Karena hanya kita yang mengetahui Kepentingan diri kita sendiri maka sudah selayaknya kita tidak melakukan “penipuan diri” dengan kebutuhan jangka pendek dan terlibat dalam kejahatan politik uang dengan menggadaikan hak asasi dan hak konstitusional kita kepada sejumlah uang atau barang.

### **Peran Tim Sukses dalam Pemilihan Umum**

Pemilihan umum (pemilu) adalah momen yang diadakan 5 tahun sekali untuk memilih pemimpin indonesia yang bertanggung jawab dan adil dalam kebijakan masyarakat indonesia. Pemilu sendiri adalah proses formal memilih seseorang untuk jabatan pemerintahan publik dan menerima atau menolak proporsi politik melalui pemungutan suara. Dimana partai politik dan kandidat bersaing untuk memenangkan dukungan publik. Dalam persaingan yang sengit seperti pemilu tahun 2024, kerja sama, solusi strategis, kinerja tim yang unggul menjadi kunci penting meraih kemenangan. Sejatinya kemenangan ditentukan oleh komunikasi yang tepat untuk mencapai satu tujuan. Sehingga dalam melihat masalah ini maka peranan tim sukses sangat diperlukan demi mencapai tujuan.

Tim sukses adalah orang yang sangat berpengaruh dalam usaha pemenangan pasangan calon, diutamakan orang yang sudah memiliki kemampuan secara manajerial serta loyalitas dan tidak dapat diragukan serta mempunyai visi dan misi jangka panjang untuk orientasi dalam pemenangan calon tanpa mengenai waktu dalam melaksanakan kegiatan sebagai tim sukses. Tim sukses adalah tim kerja dalam semua aspek untuk seorang calon kandidat dalam pemilihan umum presiden, walikota, gubernur kepala daerah untuk dapat menjabarkan program secara teknis seluruh pelaksanaan kegiatan. Tugas utama tim sukses dalam pemilu harus memiliki kapasitas leadership, semangat serta kemampuan untuk menjalankan program dan semua kegiatan.

Tim sukses harus memiliki daya ikat yang dapat membuat para anggota tumbuh dari pengalaman bersama dan bekerja sebagai suatu kelompok dalam waktu yang cukup lama. Serta daya padu ialah menjunjung tinggi integritas suatu tim untuk menyatukan suatu tujuan tim secara keseluruhan untuk dapat bekerjasama di dalam memperjalkan program kerja calon kandidat dan memenangkan kandidat dalam pemilu tahun 2024. Tim sukses di tuntut untuk dapat menjalankan program serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat berpartisipasi dan perlunya perubahan baru dalam pemerintahan yang akan datang. Tim sukses diharuskan proaktif didalam proses identifikasi masalah, karakter dan budaya sukses.

Oleh karena itu, tim sukses harus memiliki strategi/cara lain untuk mempengaruhi masyarakat dalam pemenangan kandidatnya. Maka dari itu perilaku komunikator sangat diperlukan seperti kompetensi atau penguasaan yang dimiliki komunikator pada masalah yang

dibahas, sikap yang menunjukkan pribadi komunikator apakah ia tegar tolena dalam prinsip, tujuan yng enunjukkan apakah hal hal yang disampaikan itu punya maksud yang baik atau tidak, kepribadian yang menunjukkan apak pembicara memiliki pibadi yang hangat dan bersahaba, serta dinamika menunjukkan apakah hal yang disampaikan itu menarik atau sebaliknya membosankan. Salah satu hal/idikator yang bisa berpengaruh signifikan terhadap pemenangan pemilu tahun 2024 adalh komunikasi poitik tim sukses. Komunikasi politik tim sukses berperan sebagai jembatan dalam penyampaian peran peran.

Bahkan tidak jarang sejumlah tim sukses rela mengeluarkan dana pribadinya untuk mempengaruhi masyarakat dalam pemenangan kandidatnya. Hal inilah yang menyebabkan turunnya nilai esensi dari demokrasi.

Karakteristik dari seorang tim sukses adalah saah satu penunjang dalam pemilu, maka sangat diperlukan karakteristik dari seorang tim sukses dalam kampanye yang dilakukan oleh paslon pada masyarakat. Oleh karena itu, tim sukses harus mempunyai sasarannya yang jelas, keterampilan relevan, sikpa, kepribadian, komunikasi yang tepat dari tim sukses kepada masyarakat, jiwa pemimpin yang memadai dan dukungan dari internal maupun eksternal.

Hambatan komunikasi tim sukses terhadap hasil pemenangan pemilu adalah tingkah laku masyarakat yang kurang peduli dan tidak berpartisipasi/apatis terhadap kampanye politi yng dilakukan paslon juga termasuk dalam hambatan yang harus dicegah tim sukses terhadap hasil pemenangan pemilu tahun 2024.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil temuan data pada penelitian ini maka benar bahwa praktik politik ini terjadi di masyarakat. Pemilihan presiden yang terjadi pada periode 2024, menjadi sebuah fenomena terjadinya politik uang pada periode tersebut. Jika dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini mengenai fenomenologi milik Alfred Schutz. Maka adanya suatu makna yang timbul pada pemilihan kepala desa ini sehingga terjadi politik uang untuk membeli suara masyarakat. Melihat dari pengalaman yang dialami masyarakat dalam fenomena politik uang dalam periode ini, dapat mengetahui refleksi realitas yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Jika dilihat dari kacamata Alfred sendiri individu akan melakukan suatu hal jika ada sebuah pemicu tindakan. Pada realitasnya hal ini memang terjadi, masyarakat pergi ke tempat pemilihan karena diberi uang padahal sebelumnya mereka tidak ingin pergi. Hal ini juga berlaku pada penentuan tim sukses, karena banyak masyarakat yang ingin menjadi tim sukses karena keuntungan yang akan mereka dapatkan.

Pemilu menjadi suatu tradisi yang terjadi pada masyarakat setiap bergantinya periode. Politik uang ini menjadi semarak untuk memeriahkan pemilu. Bahkan beberapa orang menganggap bahwa adanya politik uang ini semakin menarik, mereka dapat menyaksikan serta “terciprat” untung. Pemberian uang pada masyarakat seringkali diinterpretasikan bersama oleh masyarakat. Seperti untuk memilih calon tersebut, menghargai masyarakat, hingga mengganti partisipasi masyarakat. Seperti pada hasil diatas bahwa masih banyak individu yang tidak ingin pergi untuk menggunakan suara mereka. Hal ini dikarenakan sebagian dari mereka beranggapan bahwa orang lain akan memilih sehingga suara mereka tidak berdampak. Maka dari itu sesuai dengan teori yang diambil maka politik uang sudah mengakar di masyarakat, sehingga menjadi suatu fenomena yang selalu terjadi setiap periodenya.

Oleh sebab itu, tentu saja money politic akan memiliki dampak yang sangat buruk bagi pemilu dan sistem demokrasi Indonesia. Selain menjadi suatu pembodohan rakyat, persaingan antar calon kandidat baik partai politik juga akan semakin memanas. Partai Politik yang memiliki uang lebih banyak akan mendominasi dan berpotensi memperoleh

kemenangan dalam pemilu. Yang artinya, money politic ini memicu terjadinya korupsi untuk bisa mengembalikan modal politik mereka saat kampanye dan ketika perhitungan suara.

Praktek money politic bisa menyebabkan dampak negatif yang berkelanjutan dalam jangka yang panjang, dan jika hal ini dibiarkan secara terus menerus akan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak, karena bukan hanya merugikan masyarakat, namun juga dapat merugikan negara ini.

Money politic ini sangat berpotensi menghasilkan kerusakan pada manajemen pemerintahan. Karena, beberapa oknum dalam pemerintahan lahir dari proses politik uang yang secara langsung dapat berdampak dan melahirkan pemerintahan yang korupsi juga. Hal ini tentu akan menyebabkan politisi yang terpilih lebih mengutamakan kepentingan para donator daripada rakyat. Money politic mencerminkan pandangan pemilih yang tidak bisa berbuat apapun terhadap integritas calon kandidat, kecuali mereka menjual suara mereka dengan harga tertinggi. Jabatan-jabatan tersebut lahir dari proses transaksional, bukan dari proses perdebatan ide dan gagasan yang valid. Oleh karena itu, money politic akan menciptakan ketidakstabilan pemerintahan dalam menentukan kebijakan yang pro terhadap rakyat.

## **KESIMPULAN**

Pemilihan umum (pemilu) diadakan setiap lima tahun untuk memilih pemimpin yang adil dan bertanggung jawab di Indonesia. Proses pemilu melibatkan pemilihan kandidat untuk posisi publik dan persaingan antara partai politik untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Dalam pemilu 2024, kerja sama dan komunikasi yang baik menjadi kunci untuk meraih kemenangan, membuat peran tim sukses sangat penting.

Tim sukses adalah individu yang berperan besar dalam memenangkan pasangan calon, dengan keahlian manajerial, loyalitas, dan visi jangka panjang. Mereka bekerja untuk mendukung kandidat di berbagai tingkat pemerintahan dan harus memiliki kemampuan kepemimpinan serta semangat untuk menjalankan program. Tim sukses juga perlu berbagi pengalaman dan membangun integritas untuk mencapai tujuan bersama.

Politik uang merusak integritas pemilu dan menimbulkan ancaman serius terhadap kerangka demokrasi Indonesia, yang mengakibatkan korupsi dan budaya politik yang salah arah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fauzi S.A, Agus M.F. 2021. Fenomena Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun 2018. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol 23, No.1, pp 171 – 179. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=money+politik&oq=#d=gs\\_qabs&t=1733464422295&u=%23p%3DIpLpNxs\\_MN0J](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=money+politik&oq=#d=gs_qabs&t=1733464422295&u=%23p%3DIpLpNxs_MN0J)
- Nursyafa K. (2024) Dampak Money Politik terhadap Demokrasi Indonesia. *Kumparan*, Diakses 06 Desember 2024 dari <https://kumparan.com/kina-nursyafa/dampak-money-politic-terhadap-demokrasi-indonesia-23yYvkkHb1F>
- Lawani S. (2021) Bahaya Politik Uang Terhadap Pemilu dan Demokrasi. *JDIH KPU KAB BANGGAI*, Diakses 06 Desember 2024 dari <https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggai/beritadetail-5a65546c526b35334a544e454a544e45>
- Nugraha H.S. *Demokrasi dan Pemilu yang Demokratis*. Universitas Jambi, Diakses 06 Desember 2024 dari <https://www.unja.ac.id/15598/>